

BAB IV

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Dalam mengungkap isu-isu strategis harus berangkat dari permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Grobogan secara rinci sebagai berikut:

4.1.1. Pelayananan Urusan Wajib

a. Pendidikan

1. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK, SD, SLTP dan SLTA.
2. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
4. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

b. Kesehatan

1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan, keterlambatan mengambil keputusan oleh pihak keluarga, terbatasnya bidan desa yang tinggal di desa binaannya, pelayanan persalinan oleh bukan tenaga kesehatan.
2. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan ada kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.

3. Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumber daya kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan baik rujukan, maupun dasar secara kuantitas telah mencukupi namun secara kualitas belum optimal. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk masih kurang untuk kategori tertentu.
4. Masih ditemukannya gizi buruk pada anak usia bawah lima tahun atau balita.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat rasional. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membeli obat di luar resep dokter dan obat generik.
6. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin masih belum optimal.

c. Pekerjaan Umum

Jalan dan Jembatan

1. Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jaringan jalan yang ada, dan masih banyak yang mengalami kerusakan.
2. Belum terintegrasinya sistem informasi/ data base jalan/ jembatan dalam perencanaan pembangunan jalan /jembatan dan pemanfaatan ruang kota. Hal ini dapat dilihat dengan belum tersusunnya *database* secara terpadu sebagai pendukung dalam perencanaan pembangunan.

Persampahan

1. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
2. Belum optimalnya pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3. Belum optimalnya kualitas pengelolaan TPA, hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang ada masih menggunakan sistem *on-site* / olah ditempat.
4. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan di beberapa kecamatan.

Sumber Daya Air

1. Belum optimalnya pengelolaan air permukaan yang tertampung pada waduk atau embung, yang bisa dipergunakan untuk kebutuhan air baku maupun air irigasi.
2. Tidak sempurnanya kondisi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan pengairan sawah. Hal ini dapat diketahui angka kerusakan jaringan irigasi primer, sekunder maupun tersier yang masih cukup tinggi dan mengakibatkan kebocoran air irigasi.
3. Penyediaan dan pengelolaan air baku belum sesuai harapan, sehingga IPAM belum bisa beroperasi sesuai dengan kapasitas terpasang.
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.
5. PDAM masih terbatas dalam mengidentifikasi, memanfaatkan dan mengkonversi sumber daya air yang tersedia.

Air Limbah

1. Meningkatnya volume air limbah cair baik dari industri maupun domestik cukup besar, sementara unit pengolahan limbah cair yang ada belum memadai.
2. Sistem sanitasi yang masih belum terpadu dalam perencanaan induk sistem pengelolaan air limbah.
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di wilayah Kabupaten Grobogan, dimana dilihat dari sebagian besar masyarakat masih menggunakan teknik pengelolaan air

limbah secara *on-site komunal* pada lingkungan pemukiman yang padat.

4. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat) melalui pendekatan masyarakat.

Pembangunan Saluran Drainase

1. Belum optimalnya saluran/ drainase untuk mengatasi bencana banjir baik di perkotaan maupun di pedesaan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase yang ada.
3. Kondisi saluran drainase baik kuantitas maupun kualitas belum sesuai atau tidak sebanding dengan cakupan dan kondisi wilayah.
4. Belum optimalnya keterpaduan perencanaan pembangunan saluran drainase kota dengan perencanaan penataan ruang kota.
5. Persebaran saluran drainase yang masih terbatas.

Perkotaan dan Pedesaan

1. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa yang memadai, di mana baru 2-3 ruas jalan desa per kecamatan per tahun.
2. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
3. Kurang terpadunya sistem perekonomian antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

d. Perumahan Rakyat

1. Masih adanya kualitas rumah yang kurang layak huni, dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Grobogan merupakan wilayah pedesaan yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan perikanan.

2. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman, hal ini dilihat dari belum adanya kegiatan peningkatan kualitas pemukiman yang ada dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Belum diterapkannya RP4D secara optimal.
4. Belum optimalnya penataan lingkungan pemukiman, dikarenakan masih belum terlibatnya masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman dan belum dilakukannya pengelolaan data base tentang bangunan gedung yang ada baik sebagai hunian ataupun fungsi lainnya.
5. Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung, dikarenakan terbatasnya SDM pelaksana yang ada.
6. Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran gedung.
7. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Grobogan.
8. Masih banyak rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air bersih dari PDAM.
9. Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
10. Belum seimbangannya pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah.
11. Kurang adanya dorongan dari pemerintah kepada investor bidang perumahan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat.

e. Penataan Ruang

1. Belum sinergisnya rencana tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dan belum tersusunnya rencana tata ruang wilayah pada masing – masing kecamatan.
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum

optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

f. Perencanaan Pembangunan

1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya perkembangan wilayah kecamatan yang bersifat strategis dan wilayah cepat tumbuh.
3. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan.
4. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi.
5. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral, spasial dan instansional.
6. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya.
7. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundangan yang baru.
8. Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
9. Belum optimalnya kerjasama yang bersifat sinergis antara pemerintah kabupaten, baik dengan pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dalam rangka pemerataan pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan.
10. Masih terdapat kesenjangan perkembangan dan pertumbuhan desa-desa di wilayah perbatasan, terutama prasarana dan sarana dasar serta pelayanan publik.
11. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan

data yang belum optimal, belum optimalnya penelitian dan pengembangan serta belum tersedianya Standar Operating System perencanaan.

g. Perhubungan

1. Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan darat.
2. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan darat.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan darat. Hal ini ditandai belum terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi penumpang.
4. Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas dan keterpaduan sistem jaringan jalan.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kelayakan jalan kendaraan bermotor.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
7. Masih rendahnya kualitas manajemen dan rekayasa disebabkan kondisi jalan yang belum memadai.

h. Lingkungan Hidup

1. Meningkatnya kuantitas sampah domestik terutama sampah plastik, tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung sarana pengelolaan dan pengolahan sampah.
2. Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup terutama di wilayah perkotaan disebabkan aktivitas industri, pertambangan dan transportasi, rumah tangga (domestik).
3. Menurunnya kuantitas sumber daya air diakibatkan kerusakan daerah resapan / tangkapan air.
4. Masih tingginya luasan lahan kritis dan rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

5. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatnya bahan polutan yang berpotensi mencemari lingkungan akibat penambahan jumlah kendaraan dan aktivitas industri.
7. Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
8. Meningkatnya intensitas pemanasan global (*global warming*).
9. Terbatasnya luas ruang terbuka hijau terutama di wilayah padat kendaraan bermotor dan padat pemukiman.
10. Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

i. Pertanahan

1. Belum terwujudnya pembangunan sistem informasi pendaftaran tanah. Hal ini dikarenakan belum berfungsinya sistem informasi pendaftaran tanah sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan pembangunan di bidang pertanahan.
2. Belum terwujudnya penataan penguasaan dan kepemilikan serta pemanfaatan tanah yang disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan pertanahan, masih banyaknya bidang – bidang tanah yang belum didaftarkan/ disertifikatkan.
3. Masih dijumpainya konflik-konflik sengketa tanah.

j. Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil (SIAK) belum optimal sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Hal ini dapat dilihat masih dijumpainya inkonsistensi data kependudukan baik yang dikeluarkan oleh BPS maupun Dinas Kependudukan dan Sipil.

2. Kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil belum berjalan sesuai harapan.
3. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil belum sepenuhnya terwujud sesuai harapan masyarakat. Masih dijumpai penyelesaian administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak sesuai dengan target yang ditetapkan baik waktu maupun biaya pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
4. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia khususnya bidang teknologi informasi, dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
5. Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah, sehingga mempengaruhi validitas data base kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepemilikan KTP, akte kelahiran, dan dokumen kependudukan/catatan sipil lainnya.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak dan perempuan. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.
2. Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik Focal Point maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun tempat-tempat umum. Kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak yang terjadi antara lain penelantaran anak, anak nakal, anak berhadapan dengan hukum serta anak jalanan.

4. Masih tingginya kesenjangan antara laki- laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perbedaan upah.

I. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana.
2. Masih kurangnya partisipasi laki – laki dalam kesertaan program KB. Hal ini ditandai masih rendahnya presentase pengguna alat kontrasepsi MOP dan Kondom.
3. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB (PLKB) dan sarana prasarana pelayanan KB.
4. Masih tingginya persentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I.

m. Sosial

1. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, terutama keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, lanjut usia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
2. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, sehingga belum tertanganinya dengan baik permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Masih tingginya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar tim dalam program penanggulangan kemiskinan.
4. Tingginya kerentanan mantan Penyandang Penyakit Sosial untuk kembali pada perilaku yang kurang baik.

5. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
6. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

n. Ketenagakerjaan

1. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah.
2. Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial dan syarat-syarat kerja. Hal ini ditandai masih banyaknya kasus-kasus hubungan industrial yang terjadi.
4. Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

o. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha.
2. Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM. Hal ini disebabkan keberadaan lembaga pengembangan usaha dan lembaga diklat belum memadai, dan belum terbangunnya kemitraan usaha dengan perusahaan besar.
3. Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.

4. Masih rendahnya kapasitas para pengelola Koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen seadanya.

p. Penanaman Modal

1. Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri.
2. Belum optimalnya pelayanan perijinan usaha, dukungan regulasi dan kepastian hukum serta sarana prasarana pendukung investasi daerah, di antaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, perbankan, dll.

q. Kebudayaan

1. Masih rendahnya pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
2. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah sebagai asset budaya daerah.
3. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah.
4. Belum kuatnya kerjasama dan jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

r. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat.
2. Belum optimalnya peran pemuda dalam kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih rendah, serta akses pemuda dalam setiap tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.

3. Belum optimalnya upaya menumbuhkan kewirausahaan di kalangan pemuda. Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda masih rendah dan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum berkembang sesuai harapan.
4. Belum optimalnya prestasi dan pasyarakatatan olah raga. Hal ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit – bibit atlet berprestasi masih kurang/ rendah, dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan pasyarakatatan olah raga belum berjalan secara berkelanjutan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana olah raga. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah cabang olah raga dengan fasilitas tidak seimbang, dan jumlah cabang olahraga cukup besar sedangkan sarana dan prasarana masih terbatas.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.
2. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat, ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga Negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.

3. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan nasionalisme.
4. Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, antara lain disebabkan oleh kurangnya aparat kepolisian dan jumlah anggota linmas yang terlatih di masing – masing desa dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.
6. Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (Linmas) dalam melaksanakan penanganan awal gangguan kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
7. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Belum optimalnya fungsi DPRD melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
2. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan belum memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal.
3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, baik pajak, retribusi daerah, pinjaman daerah sejalan dengan peraturan perundangan yang baru, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan masih kurangnya kapasitas tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan.

5. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi di satuan kerja perangkat daerah dan pemerintah desa/ kelurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
6. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan kerjasama dalam daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam.
7. Belum tersusunnya peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis.
8. Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur Pemda yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang menyebabkan pelayanan masyarakat/publik yang transparan, responsif dan akuntabel belum dapat diwujudkan.

u. Ketahanan Pangan

1. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
2. Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
3. Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
4. Belum adanya data base potensi produk pangan.
5. Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
6. Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang.
7. Belum optimalnya produktifitas dan mutu produk pangan.

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Lemahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung pembangunan di pedesaan.
3. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan masih rendahnya kapasitas aparat pemerintah desa/ kelurahan.
4. Masih rendahnya peran perempuan pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan masih rendah. Hal ini disebabkan peran elit-elit desa masih dominan dan akses perempuan dalam setiap tahapan pembangunan belum sesuai harapan.
5. Kurangnya diversifikasi produk pangan di tingkat hulu.

w. Statistik

1. Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini dapat diketahui masih dijumpainya perbedaan data dari beberapa sumber data, baik dari BPS maupun dari instansi terkait.
2. Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen lainnya.

x. Kearsipan

1. Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, disebabkan belum adanya *database* dan jaringan informasi kearsipan.
2. Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah, disebabkan terbatasnya SDM

pengelola kearsipan dan kapasitas SDM yang masih kurang untuk melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.

3. Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip daerah dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah.

y. Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media masa bagi masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pembinaan terhadap lembaga komunikasi masyarakat.
2. Belum terbangunnya sistem informasi manajemen pemerintah daerah untuk penyebaran informasi pembangunan daerah. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
3. Kurang memadainya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika karena minimnya ketrampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
4. Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan masih lemahnya sistem informasi manajemen dan belum kuatnya jalinan kerjasama dengan media masa.

z. Perpustakaan

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah buku koleksi perpustakaan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan minimnya tenaga pengelola perpustakaan.

3. Belum terjangkaunya layanan perpustakaan di wilayah-wilayah tertentu, disebabkan oleh terbatasnya jumlah armada perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat.

4.1.2. Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani karena kepemilikan sawah oleh petani rata-rata ¼ hektar.
2. Masih rendahnya kualitas SDM pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
3. Belum optimalnya peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani.
4. Belum optimalnya diversifikasi dan intensifikasi serta pemanfaatan lahan pertanian dan pengembangan hortikultura, buah-buahan dan sayuran.
5. Lemahnya permodalan usaha pertanian serta masih tingginya bunga bank untuk usaha tani.
6. Tidak stabilnya stok pupuk, obat serta tingginya harga saprodi pertanian.
7. Tidak stabilnya harga produksi pertanian dan rendahnya nilai tukar produk pertanian serta masih rendahnya pemasaran hasil pertanian.
8. Belum optimalnya pembinaan kepada petani peternak beserta dukungan dana insentif dalam mengembangkan usaha peternakannya.
9. Masih rendahnya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
10. Masih rendahnya produksi hasil ternak, ditandai dengan fluktuatifnya hasil produksi peternakan.
11. Masih belum optimalnya pemasaran hasil produksi peternakan.

12. Belum adanya laboratorium kesehatan hewan untuk mengatasi penyebaran penyakit hewan.
13. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak terutama pada musim kemarau.
14. Masih banyak penyakit ternak terutama jenis hewan ternak besar dan unggas.
15. Adanya impor sapi dengan dalih mencukupi kebutuhan daging dalam negeri.
16. Belum optimalnya pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan.
17. Belum optimalnya pelayanan inseminasi buatan pada sapi ternak potong dan kambing, pos kesehatan hewan, rumah potong hewan dalam pelayanan publik.
18. Belum optimalnya kualitas bibit ternak, terutama induk betina.
19. Belum optimalnya pengendalian pangan yang berasal dari ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
20. Belum optimalnya penyebaran informasi pertanian
21. Belum optimalnya penyajian data statistik pertanian.
22. Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan pertanian.

b. Kehutanan

1. Belum optimalnya peran penyuluh kehutanan dan masyarakat sekitar hutan dalam pelestarian sumber daya hutan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan.
3. Masih ditemuinya perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa di sekitar hutan. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan.

4. Belum optimalnya pelayanan ijin tebang dan ijin angkut hasil hutan bagi masyarakat. Hal ini ditandai masih adanya penebangan dan pengangkutan hasil hutan rakyat tanpa ijin.
5. Belum optimalnya pelayanan data dan informasi kehutanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan belum adanya pemetaan secara digital kehutanan dan belum terbangunnya kesinambungan statistik kehutanan.
6. Masih banyaknya luas lahan kritis, disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat. Pengembangan hutan rakyat selama ini hanya berasal dari program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
7. Belum sinergisnya regulasi mengenai industri hasil hutan, sehingga rentan terhadap pelanggaran dalam pengelolaan industri hasil hutan.
8. Rendahnya infrastruktur pada kawasan sekitar hutan.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya mineral terkait pertambangan, dan belum tersedianya data potensi pertambangan yang akurat guna mendukung pemanfaatan potensi secara bijak.
2. Masih terdapat pengelolaan usaha pertambangan yang bersifat eksploitatif (PETI) dan merusak kelestarian lingkungan dan sumber mata air alami. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi di bidang pertambangan.
3. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang energi sumber daya dan mineral khususnya pertambangan.
4. Masih terdapat sejumlah dusun dan rumah tangga yang belum terlayani listrik, terutama di wilayah pedesaan dan wilayah

terpencil dan masih kurangnya pemanfaatan potensi energi alternatif atau energi baru terbarukan.

5. Belum akuratnya data potensi geologi dan belum adanya data mitigasi bencana geologi, sarana prasarana dan pengawasan mitigasi bencana geologi.
6. Belum optimalnya pengelolaan potensi mineral (tambang dan migas) oleh masyarakat Grobogan dan pemerintah Kabupaten Grobogan.

d. Pariwisata

1. Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata dan pendapatan daerah dari obyek wisata.
2. Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata dibandingkan destinasi wisata sejenis di kabupaten lain. Hal ini ditandai masih banyaknya obyek wisata daerah yang belum dilengkapi dengan daya tarik wisata dan sarana prasarana yang memadai.
3. Belum kuatnya jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

e. Perikanan

1. Masih terbatasnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan benih ikan. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, ketersediaan air, belum beragamnya jenis komoditas perikanan yang dibudidayakan dan tingginya ketergantungan pada pakan ikan buatan pabrik.
2. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap di perairan umum disebabkan masih keterbatasan alat penangkapan ikan.
3. Keterbatasan sumber daya air dalam pembudidayaan ikan air tawar.

f. Perdagangan

1. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan produk makanan yang telah kadaluwarsa.
2. Masih terbatasnya volume dan nilai realisasi ekspor. Hal ini disebabkan lemahnya daya saing produk dalam hal mutu, desain dan merk dagang produk lokal, dan belum kuatnya jaringan eksportir.
3. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah, dan belum terintegrasinya pasar lokal.
4. Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan jalan raya. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan kurang tertatanya kawasan perdagangan kaki lima.
5. Munculnya masalah sosial sebagai akibat dari banyaknya pasar swalayan/pasar modern, dan keberadaan pasar tradisional dan toko kelontong yang sudah ada kurang mendapat perlindungan.
6. Tingginya biaya ekonomi sebagai akibat dari masih rendahnya infrastruktur penunjang yang telah menyebabkan turunnya daya saing produk.
7. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
8. Berlakunya AFTA 2010 yang mempengaruhi persaingan produk- produk perdagangan antar Negara.

g. Industri

1. Masih rendahnya kapasitas iptek sistem produksi yang ditandai belum berkembangnya inovasi sistem produksi sehingga belum mampu mengoptimalkan kualitas produk industri.
2. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha dan terbatasnya akses industri kecil dan

menengah terhadap permodalan. Hal ini menyebabkan banyak industri kecil dan menengah yang kurang berkembang.

3. Masih rendahnya daya saing produk industri dibandingkan produk luar negeri dan daerah lain. Hal ini disebabkan kemampuan teknologi industri masih rendah dan belum adanya standarisasi mutu produk industri.
4. Belum optimalnya industri yang dapat menunjang pemasaran produk industri kecil dan menengah.
5. Kurang berkembangnya sentra-sentra industri daerah. Hal ini disebabkan akses transportasi yang belum memadai dan belum tertatanya informasi sentra industri.
6. Terbatasnya bahan baku industri.
7. Rendahnya kualitas SDM.

h. Ketrasmigrasian

1. Masih rendahnya pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Grobogan ke lokasi penempatan transmigrasi.
2. Semakin menurunnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi ke luar pulau Jawa.

4.2 Isu-isu Strategis

4.2.1 Kondisi Lingkungan Nasional

Kondisi lingkungan nasional yang dapat terkait dengan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini sangat ironis di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, selain di bidang pertanian dan kelautan. Beberapa penyebab tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ialah karena kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan

kesempatan kerja bagi rakyat miskin sangat kecil. Hal tersebut dapat kita lihat terutama di daerah pedesaan, banyak sekali rakyat miskin yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Di lain pihak merosotnya pengangguran di Indonesia disebabkan pula dengan banyaknya pihak swasta yang mengirimkan barang ke luar negeri seperti, beras, tekstil, bahkan gas, dll. Itu mengurangi tingkat para pekerja, yang seharusnya mereka layak mendapatkan pekerjaan karena itu merupakan produk lokal.

Tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dan daerah provinsi, termasuk Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Terjadinya Krisis Energi Nasional

Indonesia merupakan negeri yang kaya sumber daya alam (energi) dan beraneka ragam jenisnya. Akan tetapi kekayaan alam tersebut kurang dikelola dengan baik, sehingga kekayaan alam ini tidak bisa dinikmati secara murah atau gratis oleh rakyat Indonesia yang sebagian besar miskin. Munculnya kelangkaan serta tiadanya jaminan ketersediaan pasokan minyak dan gas (migas) di negeri sendiri merupakan kenyataan paradoks dari sebuah negeri yang kaya sumber energi. Hal ini antara lain disebabkan tingginya ketimpangan antara produksi dan konsumsi energi nasional.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2009 rata-rata produksi minyak bumi dan kondesat sebesar 963.269 barel per hari (bph). Sedangkan laporan BP Migas produksi minyak secara nasional pada tahun 2010 hanya naik pada kisaran 965.000 bph. Artinya terdapat angka kenaikan hanya 1.731 bph. Sementara kebutuhan konsumsi energi nasional sekitar 1.400.000 bph.

Artinya terdapat selisih cukup tajam antara tingkat produksi yang ideal dengan kebutuhan. Selain itu pesatnya pembangunan di bidang teknologi, industri, dan informasi memicu peningkatan kebutuhan masyarakat akan energi.

3. Tuntutan Perwujudan *Good and Clean Governance* yang Semakin Kuat

Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah. Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan rakyat Indonesia, di antaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur

negara. Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan rakyat.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Frekuensi serta Intensitas Bencana Alam

Penurunan kualitas lingkungan akibat perusakan hutan dan pencemaran lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan, merupakan isu penting yang harus disikapi dengan program-program pembangunan yang berkesinambungan.

Meningkatnya frekuensi kejadian berbagai jenis bencana alam dengan skala dan intensitasnya mengharuskan pemerintah menyusun rencana aksi yang sistematis dan konkrit mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat dan pada pasca terjadinya bencana (rehabilitasi-rekonstruksi). Hal ini disebabkan setiap bencana menimbulkan permasalahan kemanusiaan yang serius serta dampak sosial bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi. Bencana yang umumnya terjadi dalam waktu singkat menghancurkan hasil pembangunan yang telah dirintis dan diperjuangkan dalam waktu yang lama. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana menghancurkan perumahan, area pertanian dan perkebunan, infrastruktur perekonomian, infrastruktur publik, komunikasi dan transportasi, instalasi pengadaan air dan energi, serta bidang-bidang penting dan strategis lainnya. Bencana meluluhlantahkan seluruh aspek kehidupan manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak hanya pemerintah namun dialami pula oleh hampir semua Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah, mengalami permasalahan terbatasnya sumber dana pembangunan dibandingkan dengan kebutuhan yang demikian

besar untuk memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil, sehingga proporsi belanja daerah didominasi oleh pengeluaran untuk belanja pegawai dan belanja tidak langsung. Dengan demikian alokasi belanja langsung sangat kecil. Untuk itu partisipasi segenap lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

5. Ancaman Stabilitas Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai bentuk gangguan keamanan. Disamping gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan yang bersifat konvensional dan yang menyangkut kekayaan negara, seperti: keuangan negara (korupsi), kekayaan hasil laut (*illegal fishing*) dan hasil hutan (*illegal logging*) kita harus menghadapi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*). Lebih dari itu bangsa kita juga mengalami keamanan yang cukup mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam bentuk peledakan bom (teror), kerusuhan masa, konflik sosial dan gerakan separatis/pemberontakan bersenjata.

Menghadapi kondisi tersebut, pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tantangan lainnya yang dihadapi adalah mengurangi potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga penanaman wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara perlu lebih ditingkatkan, serta dipahami oleh seluruh

komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu hukum.

6. Penanggulangan Bahaya Narkoba

Kasus penyalahgunaan narkoba berbeda tahun ini meningkat pesat. Kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Keadaan ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagian besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa depan. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah jauh dari cukup sebagian dasar pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tetapi dalam praktek penegakan hukumnya masih terkesan tidak sungguh-sungguh, karena seringkali pelaku hanya dihukum ringan.

Mengingat peredaran narkoba sekarang ini sudah begitu merebak, maka baik pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama berusaha dalam menanggulangi bahaya narkoba.

7. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan persoalan nasional yang harus diprioritaskan penanganannya. KKN telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia. Sejak berlangsungnya era reformasi, upaya pemberantasan KKN berlangsung semakin gencar. Langkah ini sudah menjadi komitmen seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sendiri juga telah menegaskan komitmennya dalam rangka memberantas korupsi melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, ironisnya

walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktek-praktek korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya. Untuk mencegah dan menanggulangi korupsi maka dibutuhkan suatu komitmen dari seluruh strata dalam struktur organisasi, dimulai dari pimpinan tertinggi, pimpinan menengah, pimpinan terendah sampai staf atau pegawai bawahan untuk tidak melakukan tindakan tidak terpuji yaitu KKN.

8. Penurunan Hambatan Perdagangan Antar Daerah

Pada era globalisasi, kompetisi perdagangan semakin ketat, tidak hanya di lingkup internasional akan tetapi dalam lingkup nasional. Salah satu pemikiran dalam konsep perdagangan bebas adalah menempatkan kekuatan mekanisme pasar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara optimal. Meskipun menimbulkan banyak polemik, tetapi tidak sedikit masyarakat yang meyakini keunggulan mekanisme pasar bebas dapat memajukan dan membangun suatu area/kawasan melalui bentuk kesepakatan-kesepakatan regional.

Untuk mengantisipasi adanya perdagangan bebas ini, pemerintah terus berupaya menahan laju pengaruh globalisasi dan menjaga daya saing produk Indonesia sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri, diawali dengan penghapusan hambatan dalam perdagangan, baik yang berasal dari intervensi pemerintah maupun perilaku persaingan yang tidak sehat dari pengusaha sendiri. Berbagai hambatan pokok perdagangan yang dihadapi para pelaku usaha antara lain kondisi infrastruktur Indonesia yang kurang memadai menciptakan *high cost economy* yang berimplikasi pada penurunan daya saing produk, banyaknya pungutan yang membebani aktivitas perdagangan pengusaha, dan

bahaya kesulitan untuk memperoleh perijinan akan menyebabkan kendala dalam perdagangan.

9. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan isu yang penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki, seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan.

Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh.

Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (budaya patriarki), peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dan dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender, penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami

parsial kurang holistik; kemampuan, kemauan dan kesiapan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekuen, rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender. Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.

Ada dua indikator untuk mengukur kesenjangan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki. Dua indikator yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) yang merupakan indeks komposit dari komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi; dan Gender-related Development Index (GDI). Menurut HDR 2005, Indonesia berada pada peringkat HDI ke-110 dari 170 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,697, sedangkan untuk GDI menduduki peringkat 87 dari 140 negara di dunia, dengan indeks sebesar 0,691. Perbedaan angka HDI dan GDI merupakan indikasi adanya kesenjangan gender.

Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah Gender Empowerment Measurement (GEM). Angka indeks ini dihitung dari partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Angka GEM Indonesia pada tahun 2005 kurang lebih 0,458, yang berarti peran perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan kurang dari separuh dari peran

laki-laki. Di bidang politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, namun hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Menurut Komisi Pemilihan Umum (2005) keterwakilan perempuan di DPR adalah 11,6 persen dan di DPD sebesar 19,8 persen. Sementara itu, rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III, yaitu: masing-masing 9,6 persen; 6,7 persen; 13,5 persen.

10. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Kesejahteraan dan perlindungan anak, baik dilingkup regional maupun nasional menunjukkan situasi dan kondisi anak yang belum sepenuhnya memperoleh hak-haknya secara utuh. Artinya masih banyak anak yang kurang mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, terdeskriminasi hak suaranya baik dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Masih cukup banyak anak yang kurang gizi ataupun mengidap beberapa penyakit karena dampak lingkungan yang kurang sehat atau anak-anak yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan dasar. Di Indonesia masih terdapat anak dengan status gizi buruk yang dijumpai di sejumlah daerah, anak terlantar korban KDRT maupun penurunan tingkat sosial ekonomi orang tua yang jumlahnya cukup signifikan, masih tinggi kasus kematian bayi dan balita, meningkatnya jumlah anak nakal dan anak jalanan, banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja atau pekerja anak, banyaknya anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum atau anak yang berkonflik hukum, jumlah anak yang memiliki akte kelahiran, serta meningkatnya jumlah anak yang dilacurkan dan korban *trafficking* dan lain sebagainya.

Maka dari itu pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, Kesejahteraan Sosial Anak termasuk dalam Skala Prioritas Pembangunan Nasional, yang Mengacu pada Agenda Gerakan Nasional Perlindungan Anak.

Tujuan peningkatan kesejahteraan sosial anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

4.2.2 Kondisi Lingkungan Regional Provinsi Jawa Tengah

Kondisi lingkungan regional yang dapat terkait dengan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya Jumlah Penduduk Miskin

Persoalan mendesak yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah adalah tingginya jumlah penduduk miskin, yaitu sebesar 6.667.200 orang (16,56%) pada tahun 2010. Pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin, yaitu 17,72%. Dengan demikian, selama dua tahun jumlah penduduk miskin berkurang 1,2%.

2. Tingginya Jumlah Penganggur

Jumlah penganggur di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu sebesar 103,12% pada tahun 2010; jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2009 sebesar 100,03%. Jumlah penganggur ini cenderung bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan dan terjadinya PHK akibat ancaman terjadinya krisis keuangan global.

3. Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian

Permasalahan yang masih terjadi di Jawa Tengah adalah tingginya angka alih fungsi lahan pertanian ke pertanian lebih kurang sebesar 2% per tahun. Akibat adanya alih fungsi lahan ini adalah berkurangnya total produksi pertanian yang berakibat lanjutan pada berkurangnya ketersediaan pangan.

4. Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan Dasar

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang diprogramkan oleh pemerintah (pusat) belum menjangkau seluruh keluarga miskin yang ada di Jawa Tengah. Sementara ada keterbatasan kemampuan anggaran daerah untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

5. Masih Rendahnya Realisasi Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu solusi bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingginya angka pengangguran. Perkembangan realisasi investasi untuk PMDN turun dari tahun 2010 sebesar 12.070,31 trilyun menjadi 9.348,93 milyar rupiah tahun 2009 untuk PMDN, dan untuk PMA turun realisasi investasi dari 385,79 milyar rupiah menjadi 10.686,63 milyar rupiah tahun 2010. Sementara itu dari persetujuan hingga ke realisasi investasi tahun 2009 menunjukkan peningkatan, yaitu dari persetujuan sebesar 83,82 trilyun rupiah menjadi 95.079,31 trilyun rupiah. Namun tahun 2010 mengalami penurunan, yaitu dari persetujuan 1,19 trilyun rupiah yang terealisasi hanya 348,93 milyar rupiah untuk PMDN, dan untuk PMA pada tahun 2009 terjadi penurunan persetujuan investasi dari 385,79 milyar rupiah menjadi 142,39 milyar rupiah, dan tahun 2010 turun dari 317,17 milyar rupiah menjadi 106,63

6. Masih Rendahnya Akses Usaha Kecil dan Mikro Terhadap Permodalan Usaha dan Pasar Ekspor

UMKM adalah basis perekonomian yang cukup tangguh di Jawa Tengah. Kontribusi UMKM bagi penyerapan tenaga kerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, hampir mencapai 40,59 %. Sementara itu, jumlah aset UMKM sebesar 4.192 trilyun rupiah pada tahun 2005 menjadi 6.106 trilyun rupiah pada tahun 2010 atau meningkat sampai 45,65 %. Sayangnya prestasi ini tidak diimbangi dengan pelayanan permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Beberapa UMKM khususnya yang ditangani perempuan pengusaha bahkan sulit memperoleh akses permodalan. Selain itu pasar ekspor juga sulit untuk ditembus karena selain kualitas produk yang kalah bersaing, juga akses menuju tempat tujuan ekspor belum sepenuhnya mudah terjangkau.

7. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Amanah (*Good Governance*)

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak beberapa tahun lalu, didahului oleh krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang meluas menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut telah mendorong arus balik yang menuntut perbaikan atau reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi pemerintahannya. Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi yang dialami tersebut adalah karena buruknya atau salah kelola dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (*poor governance*), diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain: (1) dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang. Pihak-pihak lainnya, sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); dan (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang. Pihak-pihak yang dituntut untuk melakukan reformasi tidak hanya negara saja (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) tetapi juga dunia usaha/swasta (*corporates*) dan masyarakat luas (*civil society*). Secara umum, tuntutan reformasi berupa penciptaan *good corporate governance* di sektor dunia usaha atau swasta, penciptaan *good public governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara, dan pembentukan *good civil society* atau masyarakat luas yang mampu mendukung terwujudnya *good governance*.

8. Bencana Alam

Berbagai macam bencana alam terjadi setiap tahun di Jawa Tengah, baik banjir, kekeringan, tanah longsor, bencana gunung berapi, kebakaran hutan terjadi di Jawa Tengah. Telah disusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana maka diharapkan pengurangan resiko bencana dapat diantisipasi sebelumnya (mitigasi) bencana.

9. Masalah Penegakan Hukum

Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, demikian halnya penegakan hukum belum sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kasus korupsi banyak yang belum ditindaklanjuti, bahkan kasus yang telah lama hingga tahun 2008 belum memperoleh penanganan yang serius. Jawa Tengah adalah barometer dalam hal ketenteraman dan keamanan yang kondusif, namun dalam hal penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.

10. Belum Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Dua indikator perwujudan keadilan dan kesetaraan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Jawa Tengah sejak tahun 2008 hingga tahun 2009 meningkat sebesar 1 poin, yaitu dari 64,6

menjadi 65,03; sedangkan IDG tahun 2008 sebesar 59,8 meningkat menjadi 59,96 pada tahun 2010, atau naik sebesar 0,16. Meskipun demikian, peningkatan ini lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Saat ini IDG Jawa Tengah menduduki ranking 11 dari 33 provinsi di Indonesia. Ketidakberhasilan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender juga dapat dilihat dari tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

4.2.3. Isu –isu Strategis Kabupaten Grobogan

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Ketersediaan Air

Pada musim kemarau Kabupaten Grobogan selalu kekurangan air sehingga lahan pertanian tidak bisa berfungsi optimal. Kawasan yang paling ekstrim mengalami kekeringan menurut data tahun 2009/2010, meliputi Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati dan Kecamatan Kedungjati. Selain itu kekeringan yang terjadi pada musim kemarau menyebabkan daya dukung peternakan dan perikanan menjadi tidak optimal. Pada saat kemarau banyak embung dan waduk ada yang kering. Jumlah embung pada tahun 2008 sebanyak 22 buah. Jumlah tersebut belum mencukupi untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Grobogan.

2. Rusaknya Infrastruktur Perhubungan dan Transportasi

Sampai dengan tahun 2009 kondisi jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Grobogan masih terbatas. Pada tahun 2009 panjang jalan berkondisi baik sepanjang 248,06 km, jalan berkondisi sedang sebesar 222,25km, kondisi rusak ringan sebesar 217,51 km dan sisanya kondisi rusak berat 195,25 km. Sarana prasarana penunjang transportasi yang ada di

Kabupaten Grobogan jumlahnya juga masih terbatas, antara lain rambu-rambu lalu lintas sebanyak 267 buah, marka jalan sebanyak 30 buah, dan alat pemberi isyarat lalu lintas sebanyak 10 buah. Kondisi ini menjadi angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi, yaitu sebanyak 90 transportasi seperti terminal, halte dalam kondisi kurang baik dan kurang terawat. Armada angkutan banyak yang tidak masuk terminal dan berhenti pada di luar halte yang telah disediakan.

3. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Pada tahun 2009 Rumah tangga miskin sebesar 159.496 (38,3%) dan tahun 2010 turun sedikit menjadi (37,6%) di Kabupaten Grobogan.

Pada tahun 2008 penduduk miskin (makro) sebesar 276.665 (19,48%) dan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin (makro) 274.913 atau 19,57%) dan tahun 2010 turun sedikit menjadi 18,4%.

Terwujudnya PAP program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) tahun 2008 ada 57,tahun 2009 ada 65 dan pada tahun 2010 sebanyak 73 PAP. Pemberian tambahan makanan anak sekolah (PMTAS) tahun 2008 sebesar 1.526 dan tahun 2009 turun menjadi 891 dan tahun 2010 naik menjadi 1.030. Selanjutnya pemugaran perumahan penduduk miskin pada tahun 2008 ada 500 rumah dan tahun 2009 turun menjadi 140 rumah dan tahun 2010 tetap jumlahnya sebanyak 140 rumah.

4. Rendahnya Investasi

Investasi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 49.963.132.000,- untuk Penanaman Modal Dalam Negeri. Rendahnya investasi diakibatkan oleh kurangnya promosi investasi dan rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan belum

memiliki sarana promosi investasi yang memadai sehingga informasi tentang investasi di Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya diketahui oleh investor.

5. Belum Optimalnya Penyelenggaraan *Clean Government dan Good Governance*

Semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belum memperoleh hasil optimal. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan amanah perlu didukung oleh komitmen semua unsur pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparan dan akuntabel masih belum optimal. Masih banyak temuan yang terjadi pada saat pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan.

6. Belum Optimalnya Pengelolaan SDA Beserta Hasilnya

Pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini dilakukan belum optimal. Antara lain masih tingginya jumlah Penambangan Tanpa Ijin (PETI). Output dan nilai tambah produk pertambangan dan penggalian masih relatif dilihat dari proporsi sektor pertambangan dan penggalian terhadap total PDRB Atas Dasar harga Konstan 2000. Selain itu pengelolaan SDA belum memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga terjadi kerusakan lingkungan pada kawasan-kawasan pertambangan.

7. Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian dan Pemasaran Produk Pertanian dalam Arti Luas

Pertanian di Kabupaten Grobogan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, namun demikian produktivitas pertanian belum optimal, terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu pemasaran terhadap produk pertanian juga hanya lingkup regional saja. Bahkan untuk komoditas tertentu hanya dipasarkan di Kabupaten Grobogan saja. Kurang optimalnya produktivitas pertanian antara lain

disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.

8. Belum Optimalnya Pemerataan Akses Pelayanan Pendidikan dan Mutu Pendidikan Baik Formal maupun Non Formal

Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD/MI pada tahun 2009 sebesar 94,64% dan tahun 2010 naik sedikit menjadi 94,80%, APM SMP tahun 2009 sebesar 65,91 % dan tahun 2010 naik menjadi 69,27%. dan APM SMA tahun 2009 sebesar 36,84 % dan tahun 2010 turun menjadi 35,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah belum merata. Sedangkan angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA juga menunjukkan capaian yang cukup tinggi pada tahun 2009 dan tahun 2010.

9. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Khususnya untuk Penduduk Miskin

Kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas masih belum optimal. Tingkat ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis masih relatif rendah di tingkat Puskesmas. Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Grobogan jumlahnya masih sedikit. Demikian juga pelayanan RSUD Kabupaten Grobogan untuk pelayanan rawat inap kelas III masih belum optimal. Terutama ketersediaan peralatan kesehatan belum memadai. Selain itu, biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin juga dirasakan masih tinggi, sehingga masih memberatkan.

10. Belum Optimalnya Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara optimal terbukti masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan dan juga kasus kerusakan lingkungan oleh orang-

orang yang tidak bertanggung jawab. Penambangan liar (Penambangan Tanpa Ijin) masih banyak dijumpai di Kabupaten Grobogan yang cenderung merusak lingkungan.